

Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara

Ayu Lestari¹

Universitas Musi Rawas
ayulestari00021@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the program of youth empowerment activities. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques, namely through interviews, observation, and documentation. then the data analysis technique with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions and / verification. The results showed that the implementation of the Youth Activities Program at the Youth and Sports Office of North Musi Rawas Regency had been carried out. In the aspect of work plans, the youth and sports services, specifically in the field of youth empowerment, have been successfully carried out where they set the initial goals of the activity and afterwards formulate a policy and procedure. In the aspect of implementing organization, the field of youth empowerment has been carried out in forming a committee and distributing the main tasks and functions to the committee so that the activity is successful in achieving the initial goals of the activity. In the aspect of Human Resources, the field of youth empowerment has been carried out in mobilizing human resources, namely the committee for these activities so that the youth jamboree activities are successful and achieve their goals. And in the aspect of implementation supervision, the field of youth empowerment has been carried out in supervising the performance of the committee so that regional youth jamboree activities are successful and achieve their goals.

Keywords: *Implementation; Program; Regional Youth Jamboree.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui program kegiatan pemberdayaan pemuda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara sudah terlaksana. Pada aspek rencana kerja, dinas pemuda dan olahraga tepatnya di bidang pemberdayaan pemuda sudah berhasil terlaksana dengan terealisasinya rancangan tujuan-tujuan awal dari kegiatan tersebut dan setelahnya membuat rumusan suatu kebijakan dan prosedur. Pada aspek organisasi pelaksana, bidang pemberdayaan pemuda sudah terlaksana dalam melakukan pembentukan panitia dan melakukan pembagian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi panitia sehingga kegiatan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan awal dari kegiatan tersebut. Pada aspek Sumber Daya Manusia, bidang pemberdayaan pemuda sudah terlaksana dalam menggerakkan sumber daya manusia yaitu panitia terhadap kegiatan tersebut sehingga kegiatan jambore pemuda berhasil dan mencapai tujuan. Pada aspek Pengawasan pelaksanaan, bidang pemberdayaan pemuda sudah terlaksana dalam mengawasi kinerja panitia sehingga kegiatan jambore pemuda daerah berhasil dan mencapai tujuan.

Kata Kunci : *Implementasi; Program; Jambore Pemuda daerah..*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.40 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan proyeksi BPS pada tahun 2035 mendatang bonus demografi pemuda Indonesia berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,14 % dari tahun 2010 sebesar 238,5 juta jiwa. Bonus demografi Pemuda Indonesia sebenarnya merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang krusial bagi keberlanjutan Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Hal yang terpenting adalah mempersiapkan bonus demografi tersebut menjadi sumber daya pemuda yang memiliki daya saing, bermanfaat dan menjadi "Tonic" bagi pembangunan kepemudaan dengan menciptakan pemuda sebagai *Agen Of Change, control social, pelopor* perubahan, *teladan* dan *pemimpin* di masa depan.

Banyak sekali program-program pemuda yang diamanatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kepada Instansi Daerah yang menangani urusan kepemudaan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan kepemudaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan contohnya kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang setiap tahun dilaksanakan dengan merekrut terlebih dahulu Kegiatan Jambore Pemuda Daerah setiap Provinsi. Di Sumatera Selatan kegiatan Jambore Pemuda Daerah adalah kegiatan rutin setiap tahunnya, setiap pertengahan tahun mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan pemuda-pemuda setiap daerah untuk mempertunjukkan kreativitas yang ada pada daerahnya masing-masing. Dan Kabupaten Musi Rawas Utara salah satu daerah yang baru pemekaran tetap ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sejak

2016 Dinas Pemuda dan Olahraga mengajak beberapa perwakilan putra/putri daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jambore Pemuda Daerah.

Pemuda yang mempunyai peraturan untuk melakukan banyak perubahan, potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses kegiatan pemuda yang direncanakan. Untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan, potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan. Contohnya program kegiatan pemuda yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, mengingat pemuda di Kabupaten ini merupakan segmen yang memiliki peran penting serta daya inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka terpinggirkan biasanya akan mendorong lahirnya masalah-masalah sosial yang dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan program kegiatan pemuda pelopor pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, ditemukan bahwa faktor yang berperan penting dalam pelaksanaan program pemuda pelopor di kota Bogor adalah faktor rekrutmen peserta, faktor performance atau kinerja panitia, dan faktor pelaksanaan evaluasi. Sehingga peran pemuda sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan di Dinas Pemuda dan olahraga. Sedangkan dalam penelitian terdahulu lainnya mengenai implementasi kebijakan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun ada

beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan perlu adanya perbaikan dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang bagus. Jika dikaitkan dengan keadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara maka dapat dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara sebagai berikut :

Dalam peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 29 tahun 2017 Pasal 2 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai beberapa bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Setiap bidang memiliki program kegiatan yang telah ditetapkan.

Peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Program Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) pada tahun 2019. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda
4. Pemantauan ,analisis , evaluasi, dan pelaporan dibidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda ,peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda , peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
5. Pemberian pembimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda sreta peningkatan kreativitas pemuda.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
7. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Berdasarkan obsevasi dilapangan Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mengatakan bahwa para pemuda saat ini terfokus pada *handphone* dan *game online* dari pada mengikuti kegiatan yang berbentuk sosial atau edukasi, serta banyak juga pemuda yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara : (1.) Pemuda masih belum memiliki akses untuk berpartisipasi pada kegiatan Jambore Pemuda Daerah, (2.) Kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan pemuda masih sangat kecil, (3.) Kurang memahami pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya di Bidang Pemberdayaan Pemuda yaitu kegiatan jambore Pemuda

Daerah, dan (4.) Minimnya komunikasi dan informasi yang dapat di akses oleh pemuda tentang pemberitahuan informasi kegiatan jambore pemuda daerah dan kurangnya minat pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara"*.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Leo Agustino (2012.h.138) mendefinisikan implementasi sebagai berikut

"Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan."

Menurut Harsono (2002.H.67)

"Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program."

Menurut Zaenal Mukarom (2015, H.206) menjelaskan implementasi sebagai berikut :

"Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Prosesnya memantau kegiatan harian dalam pelaksanaan."

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Leo Agustino (2012.h.138) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai :

"Tindakan-tindakan yang dilakukan naik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Menurut definisi implementasi maka dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan yang mengukur sebuah program yang dijalankan, apakah program tersebut sudah dijalankan dengan baik atau tidak serta untuk menyempurnakan kebijakan suatu program.

Menurut Jones (dalam Arif Rohman 2009. Hal : 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Implementasi program merupakan penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2012:194) dalam siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat penting. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on*

implementation, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Menurut (*George R. Terry*, 2019. H.

1) manajemen sebagai berikut :

“manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelolah.”

Menurut (*Daryanto*, 2013. H. 2) manajemen sebagai berikut :

“manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata / *to manage* yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut (*Tjokroamidjoyo*, 2014. H. 7) Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Fungsi manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Banyak sekali ahli mengemukakan tentang fungsi manajemen ini menurut *George R. Terry* menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari :

1. *Planning*

2. *Organizing*

3. *Actuating*

4. *Controlling*

Menurut *Charles O. Jones* pengertian program yaitu Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu :

- a. Program cenderung membutuhkan staf
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri
- c. Program memiliki identifikasi sendiri.

Menurut *Jones* (*Arif Rohman*, 2009. H : 102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program merupakan unsur penting dalam sebuah kegiatan dan kebijakan dalam suatu kelompok maupun organisasi, dengan adanya program maka kelompok atau organisasi mampu melaksanakan sesuatu yang akan mereka kerjakan untuk tercapai tujuan dari organisasi atau kelompok itu sendiri.

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, memiliki 4 bidang didalam nya, yaitu (1) Pemberdayaan Pemuda, (2) pengembangan pemuda, (3) pembudayaan olahraga, dan (4) peningkatan prestasi olahraga, yang ikut membantu mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda (Pasal 1 Ayat 6 UU No.

40 Tahun 2009). Pemberdayaan pemuda hakekatnya merupakan pembangunan kapasitas pemuda melalui upaya sistematis yang dilakukan untuk memindahkan kondisi pemuda saat ini kepada kondisi yang lebih baik. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No.67 Tahun 2016 pasal 48 yang berbunyi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Dinas dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga , Bidang Pemberdayaan pemuda terdiri dari :

1. Seksi Tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
3. Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda.

Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus sert kemitraan dan penghargaan olahraga.

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi program kegiatan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Dengan fokus pada tujuan dan sasaran mengetahui pelaksanaan implementasi dalam melaksanakan program kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) 2019 Kabupaten Musi Rawas Utara, aktivitas atau kegiatan yang mencapai tujuan yang meliputi aspek – aspek yaitu rencana kerja, organisasi pelaksanaan, sumber daya manusia, pengawasan program.

Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. (Sugiyono 2017, H.65).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini memiliki nama yaitu deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2017) metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diperoleh lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Metode penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, dan mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Program Kegiatan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Rawas Utara yang beralamat, Jl. Lintas Sumatera KM.75 Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menurut Sugiyono (2012, h.62), data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner,

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Maka dari itu data primer yang peneliti dapatkan langsung dari informan tentang fakta-fakta Implementasi program kegiatan pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012, h.61), Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya.

Menurut Sugiyono (2017, h.224), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sedangkan menurut Sukardi (2011, h.27), teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), kredibel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

Menurut Afrizal (2014, h.139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Adapun informan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2017, h.301) mengatakan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam non probabilitas sampling terbagi menjadi 6 teknik yaitu: sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling.

Dari keenam teknik sampling peneliti menggunakan purposive sampling yang memiliki arti teknik penentuan sample

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono : 2013, h.219).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono (2017, h.245-252), Dalam melakukan analisa data peneliti mengacu kepada pendapat yang diungkap oleh *Miles dan Huberman* (1984) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumentasi. Dalam melakukan wawancara peneliti mewawancarai informan kunci dan informan pendukung. adapun nama-namanya dijelaskan dibawah ini:

Sumber: peneliti 2021

Dari hasil observasi saya di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 25 Agustus 2021 bahwa bidang pemberdayaan mengadakan rapat untuk menentukan tujuan-tujuan yang di capai oleh panitia bidang pemberdayaan dalam kegiatan jambore pemuda daerah.

Sesuai pendapat dari informan pertama yaitu kepala dinas pemuda dan olahraga ketika wawancara berkenaan dengan penentuan tujuan-tujuan yang hendak di capai :

“memang kegiatan jambore pemuda itu sangat penting untuk menumbuhkan kreativitas dari pada pemuda-pemuda di daerah terutama di kecamatan dan desa

jadi semua pemuda-pemuda yang didesa dan dikecamatan sebagai event menggali potensi- potensi yang ada pada pemuda-pemuda tersebut untuk kemudian diarahkan dan dikembangkan sesuai skill masing-masing seperti bakat berpuisi, yang bisa bernyanyi, kemampuan dasar berpidato, menari dan sebagainya, (Hasil Wawancara, 25 Agustus 2021)

Pada sub aspek : menentukan tujuan-tujuan dengan pihak terkait, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung kepada Informan ke 3 yang menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, menyatakan:

“membuat program kegiatan JPD tersebut ke dalam tahapan APDB yang dimulai dengan PPAS (program prioritas anggaran sementara) setelah masuk dalam pembahasan dan di sah kan menjadi APBD, selanjutnya proses penyusunan rencana rencana hingga menjadi Renstra OPD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan JPD tersebut.” (Hasil wawancara, 30 Agustus 2021). (Dokumentasi terlampir)

Pernyataan dari informan ke 3 yaitu kepala bidang pemberdayaan pemuda serupa dengan infroman ke 4 yaitu staff pemberdayaan pemuda, mengatakan sebagai berikut:

“sebelum pelaksanaan jambore daerah dimulai. Saya dan anggota lain menyiapkan dahulu rencana-rencana apa saja yang akan dimasukkan dalam program tersebut dan tujuan-tujuannya juga. Pertama kali yang dimulai dengan PPAS yaitu membuat program prioritas anggaran sementara terakait kegiatan jambore pemuda daerah lalu di resmikan menjadi APBD dan akan menjadi Renstra OPD.” (Hasil wawancara, 25 Agustus 2021)

Dari penjelasan informan 1, informan 3, dan informan ke- 4 dapat di jelaskan bahwa program kegiatan jambore pemuda daerah termasuk dalam tahapan kegiatan program dari APBD yang dimulai dengan program prioritas anggaran sementara lalu menjadi renstra OPD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan jambore pemuda.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diklarifikasikan panita bidang pemberdayaan terkait kegiatan program JPD bahwasannya sebelum kegiatan dilaksanakan anggota pemberdayaan atau panitia JPD merumuskan dahulu suatu kebijakan dan membuat prosedur kegiatan jambore pemuda daerah.

Dari hasil observasi peneliti di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 25 Agustus 2021, kepala bidang pemberdayaan menentukan dahulu tim atau panitia untuk pelaksanaan kegiatan jambore pemuda daerah.

Sesuai pendapat dari informan ke 3 yaitu kepala bidang pemberdayaan terkait penentuan anggota panitia JPD mengatakan :

“Langkah pembentukan kepanitiaan sangat penting untuk melaksanakan kegiatan jambore pemuda daerah ini. Semua staf bidang pemberdayaan terlibat dalam kegiatan jambore pemuda daerah yang dikuatkan dengan surat keputusan yang di tandatangi Bupati Muratara atau SK Bupati.”(Hasil Wawancara, 30 Agustus 2021)

Pernyataan serupa dari informan 4 yaitu staf pemberdayaan pemuda mengatakan sebagai berikut :

“sebelum melaksanakan kegiatan JPD ini. Bidang pemberdayaan menentukan dahulu panitia-panitia yang akan terlibat di program kegiatan JPD. Semua bidang pemberdayaan dilibatkan dalam kegiatan tersebut tanpa terkecuali karena kegiatan ini berkenaan dengan program pemberdayaan, partisipasi pihak terkait bidang pemberdayaan sangat menentukan keberhasilannya ” (Hasil wawancara, 25 Agustus 2021).

Dari pernyataan informan 3 dan informan 4 dapat disimpulkan sebelum melaksanakan kegiatan jambore pemuda daerah perlu ditentukan tim atau panitia penyelenggara kegiatan jambore pemuda daerah tersebut. Agar pelaksanaannya

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bidang pemberdayaan sudah menentukan kepanitiaan sebelum melaksanakan kegiatan jambore pemuda daerah tersebut dengan melibatkan semua staf di bidang pemberdayaan pemuda.

Adapun pernyataan dari informan ke 3 yaitu kepala bidang pemberdayaan pemuda mengatakan terkait tentang pembagian tugas panitia yaitu sebagai berikut: "pembagian tugas panitia itu sangat perlu. Pembagian tugas anggota panitia di buat surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas dispora kabupaten Muratara." (Hasil wawancara, 30 Agustus 2021)

Pernyataan diatas didukung oleh informan ke 4 staf pemberdayaan pemuda yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

"setelah melakukan pembentukan kepanitiaan untuk program JPD, selanjutnya pembagian tugas kepanitiaan. Seluruh yang menjadi panitia kegiatan tersebut akan dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dispora, agar kegiatan JPD tersebut bisa dilaksanakan secepatnya." (Hasil wawancara, 25 Agustus 2021)

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat di klarifikasikan bahwa dengan dilaksanakannya pembagian tugas kepada para panitia pelaksana kegiatan, pemahaman terhadap tupoksi masing-masing bidang, diharapkan capaian tujuan sesuai dengan rencana sehingga kegiatan jambore pemuda daerah tersebut berhasil dan sukses.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa aspek Rencana Kerja ditempuh dengan Langkah-langkah:; mentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai, membuat program kegiatan jambore pemuda daerah tersebut ke dalam tahapan APBD yang dimulai dengan program prioritas anggaran sementara setelah masuk dalam pembahasan, pengesahan

menjadi APBD, pemantapan rencana strategis (Renstra) OPD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan jambore pemuda daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa aspek organisasi pelaksana dengan cara menentukan anggota panitia untuk kegiatan jambore pemuda bahwa bidang pemberdayaan pemuda khususnya kepala bidang pemberdayaan pemuda menentukan kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan jambore pemuda daerah tersebut dan melibatkan semua staff di bidang pemberdayaan pemuda.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sementara organisasi pelaksana dengan cara menentukan anggota panitia untuk kegiatan jambore bahwasannya semua staff pemberdayaan pemuda dilibatkan kepanitiaan dalam kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori *Georgo R. Terry* sumber daya manusia yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Sumber daya manusia mengambil peran penting dalam tercapainya tujuan suatu kegiatan. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi soft skill maupun hard skill, maka akan dihasilkan panitia yang mumpuni dalam bidangnya dan mampu menggerakkan kegiatan jambore pemuda daerah. Tanpa adanya panitia yang berkualitas tidak akan ada proses kerja di dalam sebuah kegiatan jambore pemuda daerah. Salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penggerakan tenaga kerja adalah *actuating*. Dimana fungsi *actuating* merupakan fungsi paling penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dari

seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi sumber daya manusia justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya pengetahuan mengenai fungsi *actuating* dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan kegiatan jambore pemuda daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui aspek pengawasan program teidentifikasi denganadnya pengawasan kinerja panitia bahwasannya berhasilnya kegiatan jambore pemuda daerah dikarenakan kinerja panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kegiatan jambore pemuda daerah tersebut mencapai keberhasilan.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sementara pengawasan program dengan cara mengawasi kinerja panitia, keberhasilan dari suatu kegiatan jambore pemuda daerah karena adanya pengawasan terhadap kinerja panitia yang dilakukan sehingga mereka berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa aspek pengawasan program dengan cara mengawasi kegiatan peserta jambore pemuda daerah yang sedang di latih bahwasannya yang mengawasi peserta jambore pemuda daerah yaitu panitia seksi acara. Dan bukan hanya mengawas saja namun dibimbing dan diarahkan jika peserta jambore pemuda daerah kurang mengerti, agar tampilan dari peserta jambore maksimal dan berhasil karena untuk keberhasilan daerah Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori *Georgo R. Terry* pengawasan program yaitu mengukur

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan berbagai sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindak-tindakan korektif yang diperlukan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap peserta jambore pemuda dilakukan oleh panitia seksi acara yang bukan hanya mengawasi namun membimbing dan mengarahkan peserta yang belum bisa.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sementara pengawasan program dengan cara mengawasi kegiatan peserta jambore pemuda daerah yang sedang di latih yaitu suatu keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan kinerja panitia yang mengawasi peserta jambore pemuda daerah. Bukan hanya mengawas saja, panitia seksi acara juga membimbing dan mengarahkan peserta yang belum memahami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara sudah terlaksananya program pemberdayaan pemuda. Simpulan ini didasarkan pada aspek-aspek yang dilakukan Bidang Pemberdayaan Pemuda, dari 4 aspek yang terlaksananya Program Jambore Pemuda Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019.

Pada aspek Rencana Kerja, dinas pemuda dan olahraga tepatnya di bidang

pemberdayaan pemuda sudah melaksanakannya dimana meraka membuat tujuan-tujuan awal dari kegiatan tersebut dan setelahnya melakukan merumuskan suatu kebijakan dan prosedur.

Pada aspek Organisasi Pelaksana, bidang pemberdayaan pemuda sudah melaksanakannya baik dalam melakukan pembentukan panitia dan melakkan pembagian tugas pokok dan fungsi terhadap panitia sehingga kegiatan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan awal dari kegiatan tersebut.

Pada aspek Sumber Daya Manusia, bidang pemberdayaan pemuda sudah melaksanakan dalam menggerakkan sumber daya manusia yaitu panitia terhadap kegiatan tersebut sehingga kegiatan jambore pemuda berhasil dan mencapai tujuan. Dan juga panitia seksi acara terhadap kegiatan jambore pemuda daerah berhasil menggerakkan peserta jambore.

Pada aspek Pengawasan Program, bidang pemberdayaan pemuda sudah berperan serta sangat baik dalam aktivitasnya mengawasi kinerja panitia sehingga kegiatan jambore pemuda daerah berhasil dilaksanakan sesuai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta
- Anggara, Sahya, 2015 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Cv Pustaka Setia
- Daryanto, dkk. 2013. *Pengantar ilmu manajemen dan komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Fachrizal, Ariyadi. 2019. *Optimalisasi Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Provinsi Kalimantan Timur*. 1(7)
- FISIP UNMURA. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan skripsi*. Lubuklinggau: Program S1 Administrasi Negara
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Pasalong, Harbani, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Pemerintah Daerah. 2017. *Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga kabupaten Musi Rawas Utara*, Lembaran pemerintahan Daerah Tahun 2017 , Sekretariat Daerah. Muara Rupit.
- Pemerintahan Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahmawati, Rita, dkk 2018. *Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pelopor Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor*. 2(1)
- Rohman, Arif. 2009. *Implementasi Kebijakan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta; Laksbang mediatama.
- Sugiono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Terry R. George, dkk. 2019. *Dasar-Dasar Manajeme*. Jakarta; Bumi Aksara
- Wiarse, Made. 2019. *Implementasi Kebijakan Kepemudaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi*. 2(7)
- <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/268890/jambore-pemuda-indonesia-jpi-219-diikuti-400-pemuda>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/583154/menpora-ingin-pemuda-rajut-keberagaman-lewat-jpi-2019>